



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
SUB UNIT KERJA : BALAI PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FARID ALY IKHWAN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGASUHAN
3. NHK : 400817

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 550.000.000

1. Tanah Seluas 120 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 126 m2 di GROBOGAN, WARISAN Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/36 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 263.000.000

1. MOTOR, HONDA BEBEK MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 10.453.935**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 823.453.935**III. HUTANG** Rp. 320.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 503.453.935

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang



diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.